**PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015-2022**

**Ema Mahdalena Wati1, Erni Febrina Harahap2**

**Prodi Ekonomi Pembangunan FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Bung Hatta**

Email: [ema.m.wati@gmail.com](mailto:ema.m.wati@gmail.com), erni\_fh@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari angka Indeks Gini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh PDRB, dana Pendidikan dan Tenaga Kerja terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dan data cross section yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini memakai regresi data panel, dengan metode pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

**Kata Kunci**: Ketimpangan Pendapatan, PDRB, Pendidikan, Tenaga Kerja.

**PENDAHULUAN**

Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketimpangan pendapatan yang terjadi pada negara berkembang umumnya muncul karena adanya proses pembangunan yang sedang berlangsung. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar pada struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi sosial termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Smith dan Todaro (2012), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Adanya ketimpangan pendapat yang besar antar wilayah membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik.

Dari segi ekonomi menurut Sjafrizal (2014) menyebabkan kurang efesiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam pendapatan. Ketidakmerataan dalam pendapatan ini yang disebut dengan Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan pendapatan tidak saja disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tetapi secara kultural terjadi karena perbedaan suku atau rasisme.

Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang ada di pulau sumatera juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan pada pembangunan ekonominya. Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, seperti masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang sangat penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian dalam praktiknya, untuk menghilangkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan ke arah pemerataan yang berlangsung di Provinsi Bengkulu yaitu dengan memaksimalkan proses pembangunan dan memaksimalkan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif disetiap daerah untuk dikembangkan.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah akan menimbulkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat, antar masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi. Kecemburuan sosial yang muncul kemudian akan memperkeruh suasana karena dianggap kurang adil jika disuatu daerah yang sama ada yang memiliki pendapatan yang sangat jauh perbedaannya meskipun hal ini terlihat dalam sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dengan masih adanya ketimpangan di Indonesia, pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya mencapai sila kelima tersebut. Masalah ketimpangan pendapatan ini telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang (Arsyad, 2010).

Pengukuran ketimpangan ekonomi, secara kuantitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, salahsatunya melalui metode Indeks Gini. Hartmann et al. (2017) menjelaskan bahwa Indeks Gini dapat menjelaskan kondisi perekonomian suatu negara (diukur dari perkembangan tingkat ketimpangan ekonominya). Semakin tinggi rata-rata dari Indeks Gini suatu negara, maka ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara yang bersangkutan semakin tinggi, artinya distribusi pendapatan di negara tersebut semakin tidak merata. Ketimpangan ekonomi (pendapatan) mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin timpang kondisi ekonomi (pendapatan) suatu negara, maka akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terhambat. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan dalam kesempatan (dalam konteks hubungan antar generasi menunjukkan adanya kesenjangan antara satu generasi dengan generasi yang lain)

(Aiyar & Ebeke, 2019). Arranz (2020) menjelaskan bahwa Indeks Gini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan atau tingkat ketimpangan dalam bidang ekonomi (economic unequality) dan dalam bidang sosial (social unequality).

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan data time series selama periode 2015-2022 dan data cross section di sepuluh Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Sehingga jumlah data observasi keseluruhan penelitian ini adalah 8 x 10 = 80 data. Sumber utama data diambil dari dokumen resmi berupa data statistik, laporan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara statistik menunjukan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015-2022. Hasil Regresi ini sesuai dengan hipotesis. Koefisien regresi variabel PDRB yang bernilai -7.38E-09 menunjukan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1%, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar -7.38E-09%. Ini berarti, besar kecilnya PDRB mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan yang artinya semakin tinggi nilai PDRB maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan Begitu juga sebaliknya.

Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022. Nilai Koefisien Regresi VariabelPendidikanyang diperoleh sebesar -1.45E-07 menunjukan bahwasetiap kenaikan dari pendidikan sebesar 1% maka akan menurunkanketimpangan pendapatan sebesar 1.45E-07%, artinya bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dimana apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar satu satuan maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 1.45E-07 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat ketimpangan pendaptan akan menurun.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara statistik menunjukan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022. Nilai koefisien variabel Tenaga Kerja adalah 0.006180 menunjukan bahwa setiap peningkatan Tenaga Kerja 1%, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 1.006180%. Artinya semakin tinggi jumlah tenaga kerja, maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan apabila terjadi ketidakmerataan terhadap jumlah tenaga kerja di suatu daerah, akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. PDRB berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu tahun 2015-2022.
2. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu pada tahun 2015-2022.
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu pada tahun 2015-2022.

**Saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang komprehensif untuk upaya menaikkan tingkat PDRB dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi. Upaya peningkatan PDRB seperti pemberdayaan UMKM, memberi pelatihan keterampilan pada (SDM) dan memperluas akses infratruktuk seperti pelayanan transportasi dan jaringan listrik agar lebih merata serta menggali potensi yang dimiliki suatu daerah misalnya dengan memaksimalkan hasil pertanian atau industri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga pemerataan pendapatan bisa tercapai dan PDRB mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi pendidikan agar lebih terarah dan pengoptimalan pendidikan sesuai dengan koridornya masing-masing sehingga pengaruhnya dapat benar-benar dirasakan untuk mengurangi tingkatketimpangan yang terjadi disetiap daerah maka dari itu akan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi, pemerintah diharapkan agar lebih memaksimalkan hasil kebijakan atau program yang dinilai efektif dalam mengurangi kelebihan tenaga kerja, seperti melakukan pengawasan terhadap penyaluran anggaran program pemerintah, diantaranya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Serta memberikan pelatihan bagi masyarakat guna untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan supaya siap terjun ke dunia lapangan kerja sehingga dapat menekan tingkat pengangguran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggraeni, Katarina Resti (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Gini Ratio, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkapita Di Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2019. *Jurnal Ekonomi Bisnis*

Kuncoro, M. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan. Yogyakarta: *UPP AMP YKPN.*

Sukirno, Sadono. (2016). Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Sjafrizal . (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Yogyakarta: *LP3ES.*

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2019). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: *Erlangga*.